



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Nomor : 052 /P.01/1/2016
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Penawaran Diklat PPD RPJMD 2016**

18 Januari 2016

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan **Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD-RPJMD) Tahun 2016 bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pilkada Serentak**, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut:

1. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentative antara bulan Maret s.d. November 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2. Persyaratan calon peserta adalah :
 - a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
 - b. Pendidikan minimal S1;
 - c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun;
 - d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
 - e. Pendaftaran melalui *online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.

Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami **paling lambat tanggal 29 Februari 2016**, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. 31928280, 31928285.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana



Yahya Rachmana Hidayat



Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan);
2. PPK Perencanaan Pembangunan Nasional X (PPN X).

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(PPD-RPJMD)**

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, terdapat tiga aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, yaitu sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini saling mendukung satu sama lainnya. Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Dari sisi proses perencanaan, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

II. TUJUAN UMUM PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
2. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan RPJMN dan RPJMD;
3. Agar peserta mampu menyusun RPJMD dan Renstra SKPD;
4. Agar peserta mampu mengevaluasi RPJMD dan Renstra SKPD;
5. Agar dapat mensinergikan/mengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan daerah dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN).

IV. KELUARAN (*OUTPUT*) PELATIHAN

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat PPD-RPJMD dan Renstra SKPD ini adalah peserta terlatih dan mampu menyusun kerangka rancangan RPJMD dan Renstra SKPD.

V. METODE PELATIHAN

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang

dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, serta *field trip*, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.

VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA

1. Pendidikan minimal S1;
2. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya;
6. Pendaftaran melalui *online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VII. JADWAL PELAKSANAAN

waktu tentatif antara bulan Maret s.d. November 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren; www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

VIII. PROSES PELAMARAN

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:

1. BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya;
2. Pengiriman nama calon peserta diklat Perencanaan Mitigasi Bencana, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli;
3. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;
4. Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id atau disampaikan melalui email: pusbindiklatren@bappenas.go.id.

IX. KURIKULUM

1. Pemahaman Konsep dan Hakikat Pembangunan
 - a. Amanat UUD 1945;
 - b. Pembangunan Manusia;
 - c. Pendekatan Berbasis Hak;
 - d. Konsep Perencanaan Berkelanjutan.

2. Tata Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (PP No. 8/2000, dan Permendagri No. 58/2010).
 - a. Penyusunan RPJMN;
 - b. Penyusunan RPJMD;
 - c. Penyusunan Renstra SKPD;
 - d. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.
3. Manajemen Kinerja.
 - a. Konsep Kerangka Logika (*Logical Framework*);
 - b. Anggaran Berbasis Kinerja;
 - c. Perumusan Visi dan Misi;
 - d. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
 - e. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Perumusan Program.
4. Tata Cara Penganggaran Daerah.
 - a. Identifikasi Sumber Pembiayaan Daerah;
 - b. Identifikasi Aset Daerah;
 - c. Identifikasi Pengeluaran Daerah.
5. Analisa dan Identifikasi Lingkungan Strategis.
 - A. Identifikasi dan Analisis Lingkungan Strategis
 - a. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal;
 - b. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal.
 - B. Identifikasi dan Analisa Isu Strategis
 - a. Identifikasi dan Analisis Isu *Strategis Global (IT Perspectives)*;
 - b. Identifikasi dan Analisis Isu *Strategis Global (Economic & Social Perspectives)*.
6. Teknik dan Analisis.
 - a. Teknik dan Analisis Keuangan Daerah;
 - b. Teknik dan Analisis Penentuan Tujuan dan Sasaran (*Targeting*);
 - c. Teknik dan Analisis Proyeksi (*Projection*);
 - d. Teknik dan Analisis Penentuan Indikator Kinerja;
 - e. Teknik dan Analisis Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan (*Programming*);
 - f. Teknik dan Analisis Penentuan Anggaran (*Budgeting*).

X. KEHADIRAN PESERTA

Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat.

XI. LAMA PELATIHAN

1. Lama pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja.
2. 1 (satu) sesi = 2 jam pelajaran (jampel), 1 (satu) jampel = 45 menit.

XII. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe III, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat);
2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.

XIII. METODE EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.

Prov. Sumatera Barat

- 1 1. Kota Bukittinggi
- 2 2. Kota Solok
- 3 3. Kab. Solok
- 4 4. Kab. Dharmasraya
- 5 5. Kab. Solok Selatan
- 6 6. Kab. Pasaman Barat
- 7 7. Kab. Pasaman
- 8 8. Kab. Pesisir Selatan
- 9 9. Kab. Sijunjung
- 10 10. Kab. Tanah Datar
- 11 11. Kab. Padang Pariaman
- 12 12. Kab. Agam
- 13 13. Kab. Lima Puluh Kota

Prov. Sumatera Utara

- 14 1. Kota Medan
- 15 2. Kota Binjai
- 16 3. Kota Sibolga
- 17 4. Kota Pematangsiantar
- 18 5. Kota Tanjung Balai
- 19 6. Kota Gunung Sitoli
- 20 7. Kab. Serdang Begadai
- 21 8. Kab. Tapanuli Selatan
- 22 9. Kab. Toba Samosir
- 23 10. Kab. Labuhan Batu
- 24 11. Kab. Asahan
- 25 12. Kab. Pakpak Bharat
- 26 13. Kab. Humbang Hasundutan
- 27 14. Kab. Samosir
- 28 15. Kab. Simalungun
- 29 16. Kab. Labuhanbatu Utara
- 30 17. Kab. Labuhanbatu Selatan
- 31 18. Kab. Karo
- 32 19. Kab. Nias Selatan
- 33 20. Kab. Nias Utara
- 34 21. Kab. Nias Barat
- 35 22. Kab. Nias
- 36 23. Kab. Mandailing Natal

Prov. Riau

- 37 1. Kota Dumai
- 38 2. Kab. Kep. Meranti
- 39 3. Kab. Indragiri Hulu
- 40 4. Kab. Bengkalis

- 41 5. Kab. Pelalawan
- 42 6. Kab. Rokan Hulu
- 43 7. Kab. Kuatan Singingi
- 44 8. Kab. Rokan Hilir
- 45 9. Kab. Siak

Prov. Jambi

- 46 1. Kota Sungai Penuh
- 47 2. Kab. Tanjungjabung Barat
- 48 3. Kab. Batanghari
- 49 4. Kab. Tanjungjabung Timur
- 50 5. Kab. Bungo

Prov. Sumatera Selatan

- 51 1. Kab. Musirawas Utara
- 52 2. Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir Utara
- 53 3. Kab. Ogan Komering Hulu
- 54 4. Kab. Ogan Ilir
- 55 5. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- 56 6. Kab. Ogan Komering Ulu Timur
- 57 7. Kab. Musi Rawas

Prov. Bengkulu

- 58 1. Kab. Mukomuko
- 59 2. Kab. Seluma
- 60 3. Kab. Kepahiang
- 61 4. Kab. Lebong
- 62 5. Kab. Bengkulu Selatan
- 63 6. Kab. Rejang Lebong
- 64 7. Kab. Bengkulu Utara
- 65 8. Kab. Kaur

Prov. Lampung

- 66 1. Kota Metro
- 67 2. Kota Bandar Lampung
- 68 3. Kab. Pesisir Barat
- 69 4. Kab. Lampung Selatan
- 70 5. Kab. Way Kanan
- 71 6. Kab. Lampung Timur
- 72 7. Kab. Pesawaran
- 73 8. Kab. Lampung Tengah

Prov. Kepulauan Bangka Belitung

- 74 1. Kab. Bangka Selatan
- 75 2. Kab. Belitung Timur
- 76 3. Kab. Bangka Tengah
- 77 4. Kab. Bangka Barat

Prov. Kep. Riau

- 78 1. Kota Batam
- 79 2. Kab. Kepulauan Anambas
- 80 3. Kab. Bintan
- 81 4. Kab. Lingga
- 82 5. Kab. Karimun
- 83 6. Kab. Natuna

Prov. Jawa Barat

- 84 1. Kota Depok
- 85 2. Kab. Pangandaran
- 86 3. Kab. Sukabumi
- 87 4. Kab. Indramayu
- 88 5. Kab. Bandung
- 89 6. Kab. Karawang
- 90 7. Kab. Tasikmalaya
- 91 8. Kab. Cianjur

Prov. Jawa Tengah

- 92 1. Kota Semarang
- 93 2. Kota Surakarta
- 94 3. Kota Pekalongan
- 95 4. Kota Magelang
- 96 5. Kab. Rembang
- 97 6. Kab. Kebumen
- 98 7. Kab. Purbalingga
- 99 8. Kab. Boyolali
- 100 9. Kab. Blora
- 101 10. Kab. Kendal
- 102 11. Kab. Sukoharjo
- 103 12. Kab. Semarang
- 104 13. Kab. Wonosobo
- 105 14. Kab. Purworejo
- 106 15. Kab. Wonogiri
- 107 16. Kab. Klaten
- 108 17. Kab. Pemasang
- 109 18. Kab. Grobogan
- 110 19. Kab. Demak
- 111 20. Kab. Sragen
- 112 21. Kab. Pekalongan

Prov. DI Yogyakarta

- 113 1. Kab. Bantul
- 114 2. Kab. Gunung Kidul
- 115 3. Kab. Sleman

Prov. Jawa Timur

- 116 1. Kota Blitar

- 117 2. Kota Surabaya
- 118 3. Kota Pasuruan
- 119 4. Kab. Ngawi
- 120 5. Kab. Lamongan
- 121 6. Kab. Jember
- 122 7. Kab. Ponorogo
- 123 8. Kab. Kediri
- 124 9. Kab. Situbondo
- 125 10. Kab. Gresik
- 126 11. Kab. Trenggalek
- 127 12. Kab. Mojokerto
- 128 13. Kab. Sumenep
- 129 14. Kab. Banyuwang
- 130 15. Kab. Malang
- 131 16. Kab. Sidoarjo
- 132 17. Kab. Blitar
- 133 18. Kab. Pacitan
- 134 19. Kab. Tuban

Prov. Banten

- 135 1. Kota Cilegon
- 136 2. Kota Tangerang Selatan
- 137 3. Kab. Serang
- 138 4. Kab. Pandeglang

Prov. Bali

- 139 1. Kota Denpasar
- 140 2. Kab. Karang Asem
- 141 3. Kab. Badung
- 142 4. Kab. Bangli
- 143 5. Kab. Tabanan
- 144 6. Kab. Jembrana

Prov. Nusa Tenggara Barat

- 145 1. Kota Mataram
- 146 2. Kab. Lombok Utara
- 147 3. Kab. Bima
- 148 4. Kab. Sumbawa Barat
- 149 5. Kab. Dompu
- 150 6. Kab. Lombok Tengah
- 151 7. Kab. Sumbawa

Prov. Nusa Tenggara Timur

- 152 1. Kab. Belu
- 153 2. Kab. Malaka
- 154 3. Kab. Manggarai Barat
- 155 4. Kab. Sumba Timur
- 156 5. Kab. Manggarai

- 157 6. Kab. Ngada
- 158 7. Kab. Sumba Barat
- 159 8. Kab. Timor Tengah Utara
- 160 9. Kab. Sabu Raijua

Prov. Kalimantan Barat

- 161 1. Kab. Kapuas Hulu
- 162 2. Kab. Bengkayang
- 163 3. Kab. Sekadau
- 164 4. Kab. Melawi
- 165 5. Kab. Sintang
- 166 6. Kab. Ketapang
- 167 7. Kab. Sambas

Prov. Kalimantan Tengah

- 168 1. Kab. Kotawaringin Timur

Prov. Kalimantan Selatan

- 169 1. Kota Banjarbaru
- 170 2. Kota Banjarmasin
- 171 3. Kab. Banjar
- 172 4. Kab. Kotabaru
- 173 5. Kab. Balangan
- 174 6. Kab. Hulu Sungai Tengah
- 175 7. Kab. Tanah Bumbu

Prov. Kalimantan Timur

- 176 1. Kab. Kutai Kartanegara
- 177 2. Kab. Paser
- 178 3. Kab. Berau
- 179 4. Kab. Kutai Timur
- 180 5. Kab. Kutai Barat
- 181 6. Kota Samarinda
- 182 7. Kota Bontang
- 183 8. Kota Balikpapan
- 184 9. Kab. Mahakam Ulu

Prov. Kalimantan Utara

- 185 1. Kab. Tana Tidung
- 186 2. Kab. Bulungan
- 187 3. Kab. Malinau
- 188 4. Kab. Nunukan

Prov. Sulawesi Utara

- 189 1. Kota Manado
- 190 2. Kota Tomohon
- 191 3. Kota Bitung
- 192 4. Kab. Bolmong Timur

- 193 5. Kab. Minahasa Utara
- 194 6. Kab. Minahasa Selatan
- 195 7. Kab. Bolmong Selatan

Prov. Sulawesi Tengah

- 196 1. Kota Palu
- 197 2. Kab. Banggai Laut
- 198 3. Kab. Morowali Utara
- 199 4. Kab. Tojo Una-una
- 200 5. Kab. Poso
- 201 6. Kab. Toli-toli
- 202 7. Kab. Sigi
- 203 8. Kab. Banggai

Prov. Sulawesi Selatan

- 204 1. Kab. Pangkajene Kepulauan
- 205 2. Kab. Barru
- 206 3. Kab. Gowa
- 207 4. Kab. Maros
- 208 5. Kab. Luwu Timur
- 209 6. Kab. Tana Toraja
- 210 7. Kab. Kep. Selayar
- 211 8. Kab. Soppeng
- 212 9. Kab. Luwu Utara
- 213 10. Kab. Bulukumba
- 214 11. Kab. Toraja Utara

Prov. Sulawesi Tenggara

- 215 1. Kab. Kolaka Timur
- 216 2. Kab. Konawe Kepulauan
- 217 3. Kab. Buton Utara
- 218 4. Kab. Konawe Selatan
- 219 5. Kab. Muna
- 220 6. Kab. Konawe Utara
- 221 7. Kab. Wakatobi

Prov. Gorontalo

- 222 1. Kab. Gorontalo
- 223 2. Kab. Bone Bolango
- 224 3. Kab. Pohuwato

Prov. Sulawesi Barat

- 225 1. Kab. Mamuju Tengah
- 226 2. Kab. Mamuju Utara
- 227 3. Kab. Mamuju
- 228 4. Kab. Majene

Prov. Maluku

- 229 1. Kab. Kepulauan Aru
- 230 2. Kab. Seram Bagian Timur
- 231 3. Kab. Maluku Barat Daya
- 232 4. Kab. Buru Selatan

Prov. Maluku Utara

- 233 1. Kota Ternate
- 234 2. Kota Tidore Kepulauan
- 235 3. Kab. Pulau Taliabu
- 236 4. Kab. Halmahera Timur
- 237 5. Kab. Kepulauan Sula
- 238 6. Kab. Halmahera Utara
- 239 7. Kab. Halmahera Selatan
- 240 8. Kab. Halmahera Barat

Prov. Papua

- 241 1. Kab. Nabire
- 242 2. Kab. Asmat
- 243 3. Kab. Keerom
- 244 4. Kab. Waropen
- 245 5. Kab. Merauke
- 246 6. Kab. Membramo Raya
- 247 7. Kab. Pegunungan Bintang
- 248 8. Kab. Boven Digoel
- 249 9. Kab. Yahukimo
- 250 10. Kab. Supiori
- 251 11. Kab. Yalimo

Prov. Papua Barat

- 252 1. Kab. Pegunungan Arfak
- 253 2. Kab. Manokwari Selatan
- 254 3. Kab. Sorong Selatan
- 255 4. Kab. Raja Ampat
- 256 5. Kab. Kaimana
- 257 6. Kab. Teluk Bintuni
- 258 7. Kab. Fakfak
- 259 8. Kab. Teluk Wondama
- 260 9. Kab. Manokwari

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR

1. Nama (sesuai ijazah terakhir):..... NIP:
2. Tempat/tanggal lahir : Jenis Kelamin (L/ P).....
3. Alamat rumah :
Kab/Kota/Prov Kode Pos
- Telpon/Fax/HP (.....)
4. e-mail address :
5. Nama instansi asal :
6. Nama Unit Kerja :
7. Alamat Unit Kerja :
Kab/Kota/Prov..... Kode Pos
- Telpon/Fax/HP (.....)
8. Jabatan sekarang : Gol :
9. TMT PNS 100%, padaGol. III/a :/...../ Masa kerja:
10. Pendidikan Terakhir : S1 / S2 / S3 PT :
- Fakultas (S1/S2/S3) : Jurusan:
- Lulus tahun (S1/S2/S3) : IPK: skala:
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? : Ya/Tidak
12. Pilihan diklat yang akan diikuti :

<input type="checkbox"/> Kelayakan Proyek	<input type="checkbox"/> PPD Reguler	<input type="checkbox"/> PPP
<input type="checkbox"/> Planning and budgeting	<input type="checkbox"/> PPD RPJMD	<input type="checkbox"/> LERD
<input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi	<input type="checkbox"/> Magang Dalam Negeri	<input type="checkbox"/> Mitigasi Bencana
<input type="checkbox"/> <i>Staff Enhancement</i> / Magang di Jepang		
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini :

.....
.....
.....
Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.

..... tgl 20

Menyetujui,
Pejabat Eselon II :.....

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

KOP INSTANSI
(SuratKesediaanCost-Sharing)

(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor :

Lamp. :

Hal : KesiediaanPembiayaanDiklat

a.n. 1. Sdr. X

2. Sdr. Y

3. Sdr. Z

Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas

Di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor/...../20 , tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Item Mandatory	(dalam Rp)	Item Voluntary	(dalam Rp)	(Total Rp)
1	X					
2	Y					
3	Z					

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,

(.....)

NIP:

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....
2. Penyelenggara Diklat
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas
4. Peserta diklat yang bersangkutan

Catatan:

Mandatory adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban Instansi asal peserta berupa:

- a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi.
- b. Uang saku.

Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.